



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAHMUDDIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 198254

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.884.400.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/151.2 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 731.250.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 770 m2/168 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 431.200.000
3. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 94.000.000
4. Tanah Seluas 17500 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 113.750.000
5. Tanah Seluas 8400 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 63.000.000
6. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/108 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 371.200.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 167.100.000

1. MOTOR, SUZUKI SPIN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000
2. MOTOR, YAMAHA X-RIDE Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, HONDA CR-V Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 137.470.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	85.036.967
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.274.006.967
III. HUTANG	Rp.	401.208.479
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.872.798.488

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.